

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

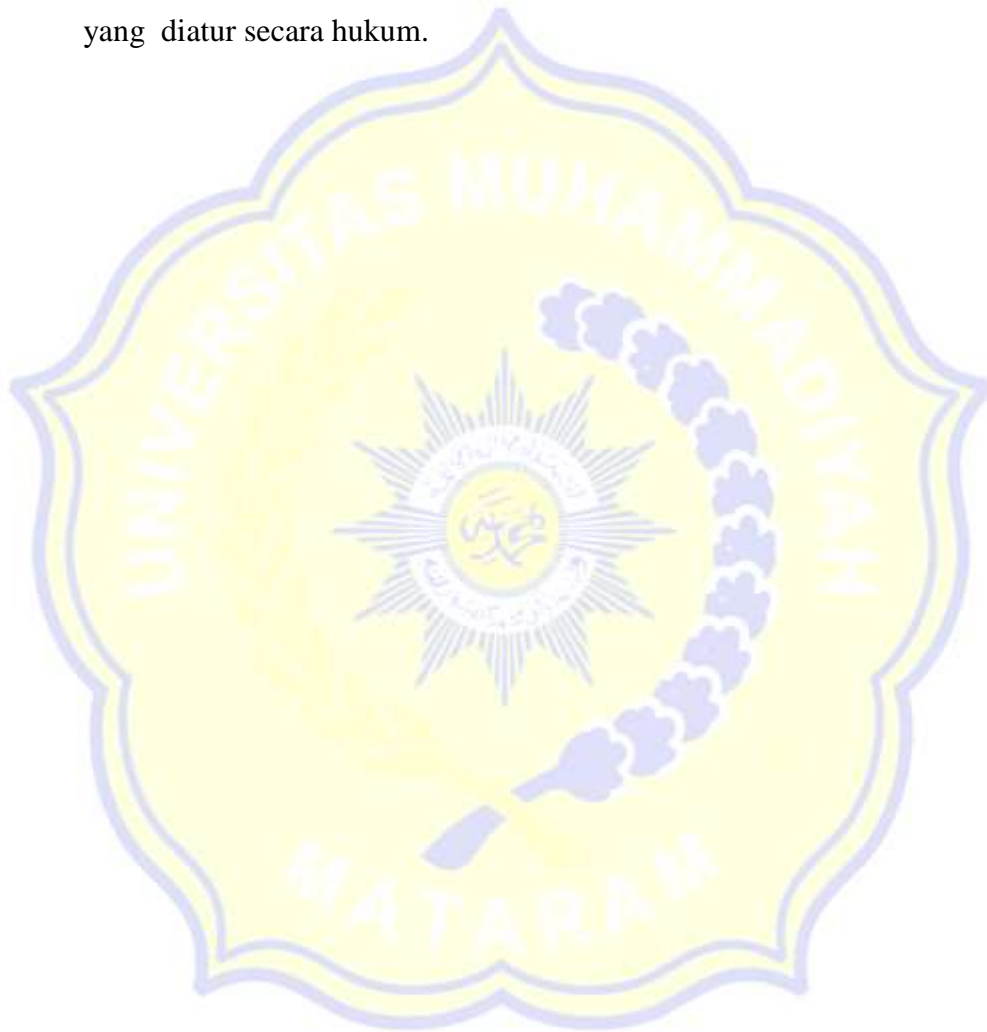
1. Peran serikat pekerja/serikat buruh nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat pekerja secara khusus berupaya memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. menghasilkan yang serasi dan adil, atas nama pegawai/pekerja organisasi yang bekerja sama di bidang ketenagakerjaan, para pengambil keputusan serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Hubungan buruh-manajemen menurut.
2. Efektifitas pelaksanaan peran serikat pekerja/serikat buruh nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh adalah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan yang rasional. Keberadaan serikat pekerja ini sangat bermanfaat bagi pekerja, karena serikat pekerja selalu berusaha untuk melindungi pekerja.

B. Saran

1. Pemerintah akan lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memperhatikan pekerja/buruh dan keluarganya dengan memperbarui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja, khususnya Pasal 25. Seharusnya. Menjadikan peran serikat pekerja/buruh lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

2. Perlu peningkatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan peningkatan standar kualitas pekerja/pekerja melalui berbagai pelatihan dan cara lain yang diatur secara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum dan Teori Pengadilan*, Kencana , Jakarta.
- Aloysius Uwiyo. 2014. *Asas-asas Hukum Perburuhan, Cet. II.* Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayu Ernita, 2019. *Pengaruh Serikat Pekerja Dan Hubungan Industrial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Tetap Pada PT Bogatama Marinusa (BOMAR)*, Makassar UIN Alauddin.
- Eko Wahyudi, 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Henry Simamora. 2012. *Manajemen sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- I Made Subawa, 2012. *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*. Kertha Patrika.
- Lalu Husni. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Payaman Simanjuntak. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Siswanto Sastrohadiwiryono. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administrasi Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taliziduhu Ndraha. 2012. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Ah Sanwani, 2018. *Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh Kspssi Di Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Mozaik Vol. X Edisi 2, E-ISSN: 2614-8390 P-ISSN: 1858-1269.
- Budi Sihabudin. 2017. *Peran serikat pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja di cv. Triona multi industry*. Jurnal KAPemda, Volume 11 No. 6, ISSN : 1979 - 5343
- Charina Lucky Pratiwi. 2021. *Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat*. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Volume 02, Issue 1.
- Cristoforus Valentino Alexander Putra. 2017. *Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 39, Nomor 1.
- Niru Anita Sinaga. 2017. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal Teknologi Industri, vol. 6
- Shinta Puspasari. 2014. *Tinjauan Terhadap Keterkaitan Prinsip Collective Bargaining Dengan Mekanisme Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volumen XI Nomor 2.
- Sonhaji, 2019. *Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja atau Buruh di PT. Apac Inti Corpora*. Journal Administrative Law & Governance, Volume 2 Issue 4, ISSN. 2621 – 2781 Online.
- Surya Nita. 2020. *Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja Dengan Pengusaha*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 6 No. 2. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874.
- Yosephine Marcella. 2016. *Peran Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volumen 4 Nomor 3, E-ISSN: 2303-0569.
- Zainun Zakya Nugrahayu. 2015. *Perspektif Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal IUS, Vol III | Nomor 8

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. LN No. 425, TLN No. 573-2.

D. Internet

Dhian kusumawardhani, *Serikat Pekerja: Kenali Tujuan dan Fungsinya*, <http://id.hrnote.asia/personnel-management/serikat-pekerja-201118/#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20umum%20pasal%201,mandiri%2C%20demokratis%2C%20dan%20bertanggung%20jawab> diakses pada 1 Juni 2021.

